



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Sentimen Masyarakat terhadap
Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh :
Dinda Rahma Aulia
6072001057

BANDUNG
2024



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Terakreditasi Unggul
SK BAN-PT No. 1844/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Sentimen Masyarakat terhadap
Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Skripsi

Oleh :
Dinda Rahma Aulia
6072001057

Pembimbing :
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP, M.Si

BANDUNG

2024

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Dinda Rahma Aulia
Nomor Pokok : 6072001057
Judul : Sentimen Masyarakat terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 22 Juli 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

: 

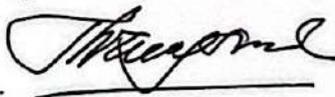
Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

: 

Anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha June

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Rahma Aulia
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 6072001057
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Sentimen Masyarakat terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis telah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Juli 2024



Dinda Rahma Aulia

ABSTRAK

Nama : Dinda Rahma Aulia
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 6072001057
Judul : Sentimen Masyarakat terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah substansial guna meningkatkan akses perumahan, secara aktif mengurangi backlog perumahan nasional dan melindungi hak masyarakat atas hunian yang layak. Salah satu bukti komitmen ini adalah penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Sejak ditetapkan kebijakan tersebut mendapatkan tanggapan masyarakat. Terdapat resistensi oleh masyarakat terhadap kebijakan Tapera dikarenakan adanya perbedaan tujuan kebijakan dan hasil kebijakan dengan harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan analisis sentimen dapat mengidentifikasi tanggapan masyarakat terhadap Tapera.

Penelitian ini mengkaji sentimen masyarakat terhadap kebijakan Tapera melalui analisis sentimen media sosial. Data pada penelitian ini diperoleh melalui Twitter dari Mei 2024 sampai Juni 2024. Menggunakan metode analisis sentimen untuk mengklasifikasikan polaritas sentimen. Pengumpulan data menggunakan pengkodean *Google Colaboration* dan analisis data dilakukan menggunakan software *Communalytic*. Hasil analisis sentimen otomatis menggunakan *machine learning* menunjukkan sentime positif, Sedangkan analisis sentimen manual menunjukkan sentimen negatif. Perbandingan ini memberikan temuan bahwa *machine learning* tidak sepenuhnya mampu menentukan polaritas sentimen khususnya pada nuansa bahasa manusia. Penelitian ini mendorong pemerintah untuk memahami sentimen masyarakat dalam proses kebijakan. Selain itu, rekomendasi dari penelitian ini untuk dapat meningkatkan akurasi dalam memahami nuansa bahasa manusia serta mengintegrasikan analisis sentimen berbasis *machine learning* dan manual.

Kata Kunci: Analisis Sentimen, Kebijakan publik, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

ABSTRACT

Name : Dinda Rahma Aulia
Student ID No. : 6072001057
Title : Public Sentiment Towards Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Policy

The Indonesian government has taken substantial steps to improve housing access, actively reduce the national housing backlog and protect the people's right to decent housing. One proof of this commitment is the stipulation of Government Regulation (PP) Number 21 of 2024 concerning the Implementation of Public Housing Savings (Tapera). Since the policy was enacted, it has received public response. There is resistance by the public to the Tapera policy due to differences in policy objectives and policy outcomes with the hopes, desires and needs of the community. By conducting sentiment analysis, it can identify public responses to Tapera.

This study examines public sentiment towards the Tapera policy through social media sentiment analysis. The data in this study were obtained via Twitter from May 2024 to June 2024. Using the sentiment analysis method to classify sentiment polarity. Data collection using Google Collaboration coding and data analysis was carried out using Commanalytic software. The results of automatic sentiment analysis using machine learning show positive sentiment, while manual sentiment analysis shows negative sentiment. This comparison provides findings that machine learning is not fully capable of determining sentiment polarity, especially in the nuances of human language. This study encourages the government to understand public sentiment in the policy process. In addition, the recommendations from this study are to improve accuracy in understanding the nuances of human language and integrate machine learning-based and manual sentiment analysis.

Keywords: Sentiment Analysis, Public Policy, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya dan ridho-Nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Sentimen Masyarakat terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)*” dengan baik dan sesuai kaidah penulisan ilmiah yang ada. Karya ilmiah ini disusun sebagai syarat dalam memenuhi persyaratan sebagai bagian akhir dari seluruh rangkaian program pendidikan agar dapat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti juga menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini juga, izinkan peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada selaku orang tua kandung peneliti Etty Rochaety (Mama) dan Toni Purnama S.H (Papa), Kakak-kakak tersayang saya Isa Akbar, Ratih S, Gilang Fajar Shadiq S.H, M.H., Daeng Karina A dan Dara Baiq Qanisa dan keponakan saya tercinta Arsalan Athar Shadiq yang dengan senantiasa memberikan dukungan baik secara moral dan material sehingga peneliti dapat menyelesaikan hampir seluruh rangkaian program pendidikan ini.

Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang dengan senantiasa selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menulis penelitian, membagikan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, serta meluangkan banyak waktu untuk membimbing peneliti hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Orpha Jane selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan; Bapak Kristian Widya Wicaksono, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik

Parahyangan; Bapak Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.Sos., M.A.P, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan; dan segenap Bapak/Ibu dosen serta jajaran staf Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.

2. Nenek-nenek tercinta Alm. Srie Sukiyem yang semasa hidupnya selalu memberikan saya motivasi & Euis Laelasari yang selalu menyemangati saya. Serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.
3. Ichkam Mahhesa S. Pd. selaku *partner* penulis. Terima kasih karena selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan saran dan menyemangati penulis. Terus bersama dan merayakan setiap kebahagiaan!
4. Seluruh sahabat kuliah yang terdiri dari Avina, Barbara, Cinta, Farah, Dheyana, Ulivia dan Vienka. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan. Sukses selalu semuanya!
5. Fransisca Ratri & Della Dwi Febryan. Sahabat sedari SMA penulis yang telah menjadi pendengar segala keluh kesah penulis dan selalu menyemangati penulis. Sukses selalu!
6. Arulla Hilmi Dhiyaa & Tamarine Ayunillah. Sahabat sedari SMP penulis yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Sukses selalu!
7. Teman-teman seperjuangan bimbingan Nayla, Milla dan Maja, semoga mendapatkan nilai terbaik. Sukses bersama.
8. Seluruh teman Program Studi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2020 yang sedang berjuang bersama tetap semangat dan sukses selalu.
9. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih karena tidak pernah menyerah. Tetap percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki dan tetap semangat di setiap langkah menuju masa depan.

Sebagai penutup, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan dapat memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna.

Bandung, Juli 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dinda Rahma Aulia', written in a cursive style.

Dinda Rahma Aulia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	16
1.4 Pertanyaan Penelitian	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	17
1.6.1. Manfaat Akademis	17
1.6.2. Manfaat Praktis	18
BAB 2 KERANGKA TEORI	19
2.1 Kebijakan Publik	19
2.2 Analisis Sentimen	22

2.2.1.	Analisis Sentimen pada Administrasi Publik	24
2.2.2.	Analisis Sentimen terhadap Kebijakan Publik	25
2.3	<i>Machine Learning</i>	27
2.4	Penelitian Terdahulu	29
2.5	Kerangka Berpikir	31
BAB 3	METODE PENELITIAN	32
3.1	Tipe Penelitian	32
3.2	Peran Peneliti	34
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	35
3.3.1.	Jenis Data	35
3.3.2.	Sumber Data	36
3.4	Pengumpulan Data	38
3.4.1.	<i>Google Colaboratory (Python Programming Language)</i>	38
3.4.2.	<i>Communalytic</i>	43
3.5	Analisis Data	50
3.6	Keabsahan Data	52
BAB 4	GAMBARAN UMUM PENELITIAN	55
4.1	Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)	55
4.2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	58
4.3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	59
BAB 5	HASIL DAN PEMBAHASAN	62

5.1	<i>Post Per Day</i>	62
5.2	<i>Word Cloud</i>	65
5.3	<i>Top Ten Posters</i>	66
5.4	Analisis Sentimen	69
5.4.1.	Matriks Silang Sentimen Communalytic	75
5.4.2.	Analisis Sentimen Manual	78
5.5	Analisis Toksisitas	81
BAB 6	KESIMPULAN DAN SARAN	99
6.1	Kesimpulan	99
6.2	Saran	101
	DAFTAR PUSTKA	103
	LAMPIRAN	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sentimen Negatif terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).....	10
Gambar 1.2 Sentimen Positif terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)	11
Gambar 1.3 Sentimen Masyarakat terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)....	12
Gambar 3.1 Pengumpulan data Twitter melalui Google Colaboration.....	39
Gambar 3.2 Hasil Pengumpulan Data Twitter	40
Gambar 3.3 Mengunggah file CSV menjadi File XLSX Excel	41
Gambar 3.4 Mengunggah File XLSX pada Google Sheet	42
Gambar 3.5 Mengubah kolom “full_text” menjadi “body”	47
Gambar 3.6 Menerjemahkan File XLSX Melalui Google Translate dengan Format Documents.....	48
Gambar 3.7 Mengekspor File XLSX menjadi CSV	49
Gambar 3.8 Unggah File CSV pada Communalytic	50
Gambar 5.1 Grafik Post Per Day Tapera.....	63
Gambar 5.2 Word Cloud Tapera	66
Gambar 5.3 Top Ten Posters Tapera.....	67
Gambar 5.4 Analisis Sentimen Tapera.....	69
Gambar 5.5 Matriks Silang Sentimen Communalytic	76
Gambar 5.6 Analisis Toksisitas Tapera.....	82
Gambar 5.7 Tren Toksisitas Sentimen Tapera	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Pengumpulan Data melalui Google Classroom.....	40
Tabel 5.1 Tren Posts Per Day Tapera.....	63
Tabel 5.2 Top Ten Posters Tapera	67
Tabel 5.3 Sentimen Positif	71
Tabel 5.4 Sentimen Negatif.....	72
Tabel 5.5 Sentimen Netral.....	74
Tabel 5.6 Analisis Sentimen Manual Tapera	79
Tabel 5.7 Sentimen Sarkasme	79
Tabel 5.8 Toxicity Analysis: Toxicity	83
Tabel 5.9 Toxicity Analysis: Severe Toxicity.....	86
Tabel 5.10 Toxicity Analysis: Identity Attack	87
Tabel 5.11 Toxicity Analysis: Insult.....	90
Tabel 5.12 Toxicity Analysis: Profanity	91
Tabel 5.13 Toxicity Analysis: Threat.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Bulan Mei — Juni	111
--	-----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi kebijakan publik di Indonesia saat ini dinilai masih belum optimal. Kualitas kebijakan di Indonesia menunjukkan dalam sepuluh tahun akhir ini masih berada dibawah negara-negara di Asia Tenggara, seperti Singapura (87,1 persentil), Malaysia (68,4 persentil) dan Thailand (61,6 persentil).¹Sedangkan Menurut Worldwide Governance Indicators (WGI) kualitas kebijakan Indonesia pada tahun 2022 yaitu 59,4 persentil². Seringkali, Kebijakan publik dibuat tanpa didasarkan pada data dan fakta yang akurat, tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis) yang kuat tentang hubungan sebab dan akibat antara kebijakan tersebut dan hasil yang akan dicapai, dan tanpa melibatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri (Budi Santoso, 2016). Kebijakan terkadang diambil secara emosional dan reaktif untuk menanggapi tekanan publik dan permasalahannya. Menurut

¹ Kompas. "Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan". 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/02/21232571/ukur-capaian-reformasi-birokrasi-lan-gelar-seminar-indeks-kualitas-kebijakan?page=all>

² World Bank. Worldwide Governance Indicators: Regulatory Quality Percentil Indonesia 2022.

Thomas Dye (1981) dalam Subarsono kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah dalam melakukan atau tidak melakukan “...*Public policy is whatever government choose to do or not to do*” (Subarsono, 2005) Pada dasarnya sesuatu keputusan dan tindakan pemerintah yang dibuat guna memecahkan masalah publik.

Kebijakan berperan dalam memecahkan masalah publik, dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat untuk masyarakat luas. Menyangkut kepentingan masyarakat luas merupakan ranah yang dimiliki secara bersama-sama. Masalah publik terdiri dari beberapa sektor yakni ekonomi, sosial, lingkungan hidup, infrastruktur, politik dan pemerintahan serta keamanan negara. Pemerintah memegang peran sangat penting dalam seluruh proses kebijakan. Menurut Michael Howlet dan Ramesh (1995) dalam Subarsono proses kebijakan publik mencakup penyusunan agenda (*agenda setting*), formulasi kebijakan (*policy formulation*), pembuatan kebijakan (*decision making*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) (Subarsono, 2005).

Pada seluruh proses kebijakan publik, tahap implementasi kebijakan merupakan tahapan secara nyata yang akan memberikan makna positif dan sumbangan ril pada *output* (hasil) dan *outcomes* (dampak) dari sebuah kebijakan (Sutmasa, 2021). Implementasi kebijakan adalah bagian terpenting

pada rangkaian proses kebijakan (Zulkarnain, 2017). Pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif guna memecahkan masalah-masalah publik.

Saat ini pembiayaan perumahan telah menjadi salah satu permasalahan publik yang cukup krusial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Khususnya untuk kalangan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Backlog rumah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 9,9 juta³. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingginya kesenjangan antara kebutuhan rumah dan pasokan rumah. Kesulitan masyarakat Indonesia yakni dalam mengakses kredit perumahan dan keterbatasan kemampuan finansial yang menjadi hambatan untuk dapat memiliki rumah layak huni. Dalam upaya mengatasi hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan tersebut merupakan inisiatif nasional yang memiliki tujuan untuk

³ PUPR, "Kementerian PUPR: Kolaborasi kunci atasi Backlog Perumahan", 2024. <https://perumahan.pu.go.id/berita/detail/kementerian-pupr-kolaborasi-kunci-atasi-backlog-perumahan>

memfasilitasi masyarakat dalam mengumpulkan dan secara kolektif dan sistematis guna membiayai kebutuhan perumahan.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu jutaan orang Indonesia yang selama ini menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kredit perumahan murah. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dimaksudkan untuk memberi masyarakat kesempatan untuk menabung secara bertahap dan mengumpulkan uang yang dapat digunakan sebagai uang muka atau cicilan untuk membeli rumah, melunasi kredit perumahan atau merenovasi rumah mereka. Namun, banyak reaksi dari masyarakat sejak Peraturan Pemerintah (PP) Tapera diundangkan. Sebagian kelompok masyarakat melihat kebijakan ini sebagai upaya nyata pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang meragukan keberhasilan kebijakan dan mengkhawatirkan adanya kemungkinan penyalahgunaan dana Tapera. Kekhawatiran tambahan terkait kewajiban membayar iuran sebesar 3% dari gaji yang dianggap akan meningkatkan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Dengan adanya pro dan kontra pada masyarakat mengenai implementasi kebijakan Tapera, dalam hal tersebut pada mengimplementasikan sebuah kebijakan peran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dikarenakan kebijakan yang didukung oleh masyarakat memiliki peluang yang lebih besar

untuk berhasil diimplementasikan. Kebijakan dapat diinterpretasikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh negara dengan rakyat (Wayne, 2008). Masyarakat berperan dalam memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat memberikan umpan balik tentang keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan serta dampaknya langsung di masyarakat. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang persepsi dan reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Dengan melakukan analisis sentimen terhadap kebijakan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024, pemerintah dapat memahami persepsi, kekhawatiran dan harapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dikarenakan, Analisis sentimen merupakan analisis yang bertujuan untuk melihat dan mengidentifikasi tanggapan, persepsi dan reaksi masyarakat. Sentimen masyarakat yaitu berupa opini, reaksi, sikap dan perasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap suatu subyek, sangat mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan kebijakan publik. Masyarakat akan menerima positif yang dapat dikatakan sebagai sentimen positif terhadap suatu kebijakan yang nantinya mereka akan lebih mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut. Namun, Sebaliknya, sentimen negatif dapat menghasilkan resistensi dan protes

masyarakat terhadap kebijakan tersebut sehingga menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan media sosial saat ini telah memberikan peluang dan wadah bagi masyarakat dalam berkomunikasi kepada pemerintah. Masyarakat menyuarakan melalui berbagai *platform* media sosial untuk memberikan pendapat, masukan bahkan kritikan sebagai protes mereka terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Media sosial memiliki cakupan yang begitu cepat dan luas sehingga seringkali menghasilkan sesuatu yang *viral*. Pemerintah dapat lebih mudah melihat dan mengidentifikasi adanya sentimen masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah dengan melihat sentimen masyarakat melalui media sosial. Selain itu, platform *online* memudahkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menyebarkan dan mensosialisasikan kebijakan Tapera, menjawab pertanyaan dan secara langsung menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintah. Interaksi seperti ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dapat mempengaruhi sentimen masyarakat secara positif dengan menunjukkan keterbukaan dan responsivitas pemerintah.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Meluapnya protes masyarakat kepada kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Adanya gelombang protes dan penolakan oleh masyarakat terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Protes muncul dalam berbagai bentuk dan skala yang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat yang luas. Protes dan kritikan oleh masyarakat telah berlangsung hingga terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan para buruh di Indonesia menolak kebijakan Tapera di depan Istana Negara (Kompas, 2024)⁴. Massa buruh tersebut yakni dari KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) dan Partai Buruh. Tuntutan demo tersebut yakni para buruh menolak kebijakan Tapera untuk diimplementasikan, kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Iqbal Said selaku Presiden Partai Buruh tidak ada kepastian untuk memiliki rumah bagi para buruh walaupun sudah bekerja selama 10 tahun atau sampai 20 tahun (Kompas, 2024)⁵.

⁴ Kompas, "Tolak Tapera, Ini 5 Tuntutan Demo Buruh Hari Ini", Tim Redaksi, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/06/134500165/tolak-tapera-ini-5-tuntutan-demo-buruh-hari-ini> Diakses pada 7 Juni 2024

⁵ *Ibid.*

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak kebijakan Tapera. Potongan sebesar 3% berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sangat membebankan para pekerja. Kebijakan tersebut berlaku wajib untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI, Polri, pekerja BUMN, swasta dan pekerja mandiri termasuk guru honorer non ASN. Sudah banyak potongan pada gaji mereka seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Iuran wajib setiap bulan Organisasi Profesi Guru dan koperasi guru (Detik, 2024)⁶. Sedangkan jika kebijakan Tapera diimplementasikan maka potongan gaji akan bertambah, sementara pada saat ini kesejahteraan para guru masih tidak ada kepastian, para guru honorer maupun guru swasta hanya mendapatkan upah yang sangat minimum. Ketimbang memotong gaji pegawai untuk Tapera lebih baik untuk meningkatkan upah minimum di berbagai wilayah. Kebijakan tersebut menunjukkan tanpa adanya pertimbangan dengan melihat keragaman kondisi ekonomi masyarakat.

Kritik terhadap Tapera yaitu pada skema tabungan, mulai akademis dan pakar ekonomi menilai skema tabungan pada Tapera terlalu memaksakan

⁶ Detik, "Nasib Guru Swasta & Honorer Dipertaruhkan, P2G Tolak Kebijakan Tapera", 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7376024/nasib-guru-swasta-honorer-dipertaruhkan-p2g-tolak-kebijakan-tapera> Diakses pada 7 Juni 2024

mekanisme pasar dan tidak memberikan solusi yang jelas untuk mengatasi masalah kekurangan rumah yang terjangkau (Kompas, 2024)⁷. Protes dan kritikan tersebut mencerminkan bahwa kebijakan Tapera tidak sesuai dengan realitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat dengan berpenghasilan rendah yang seharusnya menjadi target sasaran utama kebijakan ini.

2. Terindikasi sentimen negatif terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui media sosial

Semenjak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tepera) diluncurkan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia, ternyata menimbulkan berbagai reaksi dan persepsi masyarakat, terutama pada *platform* media sosial. Dilansir kata kunci “Tapera” menempati posisi nomor satu *trending topic* pada media sosial X atau yang lebih dikenal Twitter (CNN Indonesia, 2024)⁸. Terhitung pada tanggal 28 Mei 2024 terdapat sekitar 61 ribu tweet atau cuitan dengan topik Tapera. Terindikasi terdapat sentimen

⁷ Kompas, “Pakar Ekonomi Unair Nilai Tapera Program yang Memaksakan Pasar”, 2024. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/05/30/135718478/pakar-ekonomi-unair-nilai-tapera-program-yang-memaksakan-pasar> Diakses pada 7 Juni 2024

⁸ CNN Indonesia, “Trending di X, Warganet Sindir Tapera jadi Tambahan Penderitaan Rakyat”. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240528150344-192-1102888/trending-di-x-warganet-sindir-tapera-jadi-tambahan-penderitaan-rakyat> Dikases pada 7 Juni 2024

masyarakat berupa sentimen negatif, positif maupun netral terhadap kebijakan Tapera.



Gambar 1.1 Sentimen Negatif terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Sumber: Twitter, Diuraikan oleh Peneliti

Sentimen negatif diatas merupakan salah satu dari berbagai persepsi dan reaksi negatif masyarakat terhadap kebijakan Tapera. Sentimen negatif sebagian besar memperlihatkan menolak kebijakan tersebut untuk diimplementasikan dan kekhawatiran masyarakat mulai dari efektivitas kebijakan, skema tabungan dan mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tabungan Tapera serta mengkhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan dana tersebut. Dengan gaji komite Tapera sebesar 43 juta

semakin membuat masyarakat marah dan kecewa serta menyebut Tapera semata hanya sebagai penderitaan rakyat.



Gambar 1.2 Sentimen Positif terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Sumber: Twitter, Diuraikan oleh Peneliti

Sentimen positif diatas merupakan salah satu dari berbagai persepsi dan reaksi masyarakat terhadap kebijakan Tapera. Sentimen positif sebagian besar melihat manfaat dan yakin terhadap kebijakan Tapera. Dalam upaya mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia dan tingkat *backlog* perumahan yang tinggi. Tapera sebagai program lanjutan seperti Bapertarum yang diperuntukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) namun dengan Tapera akan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada pekerja-pekerja lainnya untuk mendapatkan hunian.



Gambar 1.3 Sentimen Masyarakat terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Sumber: Twitter, Diuraikan oleh Peneliti

Terdapat beberapa sentimen masyarakat yang dilontarkan dengan bahasa sarkasme atau sindiran sebagai ungkapan persepsi dan reaksinya pada kebijakan Tapera. Seperti memperlihatkan rumah di taman bermain sebagai sindiran hasil rumah melalui Tapera yang telah dikumpulkan selama 20 tahun. Lalu terdapat sarkasme yang mengganti kata “perumahan” pada singkatan Tapera menjadi hal-hal yang mengarah kepada hal negatif, misalnya “Tabungan Pemakaman Rakyat”, “Tabungan Pemalak Rakyat”, “Tabungan Penderitaan Rakyat”, “Tabungan Penipuan Rakyat” dan “Tabungan Penyiksa Rakyat”. Tentunya dengan bahasa sarkasme dan sindiran tersebut dapat memicu diskusi

lebih banyak lagi karena dianggap ampuh dalam menyindir dan mengkritik pemerintah.

3. Fenomena viral memicu tanggapan pemerintah

Terdapat istilah “*No Viral, No Justice*”⁹. Melalui *platform online* dan media sosial yang memiliki arti bahwa sesuatu yang tidak *viral* maka tidak ada keadilan. Fenomena “tidak viral, tidak ada keadilan” muncul karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dalam menindak kasus-kasus (Simon R et al., 2024). Setelah sebuah peristiwa *viral*, memiliki peluang lebih besar untuk ditindaklanjuti. Sama halnya sejumlah kasus di Indonesia seringkali ditanggapi oleh pemerintah melalui *viral*. Fenomena *viral* tersebar secara luas dan cepat sehingga memicu reaksi masif dari masyarakat. Reaksi masyarakat yang menjadi *viral* lebih mudah dan kemungkinan besar akan ditanggapi oleh pemerintah atau sebaliknya. Kasus atau peristiwa yang tidak *viral* seringkali luput dari sorotan publik dan kurang mendapatkan tanggapan pemerintah.

Terdapat beberapa program dan kebijakan pemerintah yang ditunda untuk diimplementasikan setelah terjadi reaksi masyarakat yang *viral* dalam

⁹ Universitas Airlangga, “*Pascasarjana UNAIR Ulas Fenomena No Viral No Justice di Indonesia*”, 2024 <https://unair.ac.id/pascasarjana-unair-ulas-fenomena-no-viral-no-justice-di-indonesia/> Diakses pada 9 Juni 2024

menanggapinya. Seperti UKT (Uang Kuliah Tunggal) naik, masyarakat mengungkapkan dan menceritakan pengalaman selama perkuliahan dengan dibebani oleh UKT yang tergolong mahal, hal tersebut menjadi viral di media sosial dan akhirnya pemerintah menunda untuk menaikkan UKT¹⁰. Kritik dan keluhan masyarakat di media sosial menjadi penting sebagai upaya dalam berkomunikasi dengan pemerintah. Tanggapan dan opini yang diutarakan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Sehingga, analisis sentimen masyarakat terhadap kebijakan publik penting untuk dilakukan agar dapat menjadi alternatif kepada pemerintah dalam memperbaiki komunikasi dengan masyarakat dan dapat membantu pemerintah lebih responsif dalam menjawab kebutuhan publik. Oleh karena itu, pemerintah telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Dalam proses kebijakan publik yakni perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan seperti Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) penting bagi para pembuat kebijakan untuk memahami tanggapan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik merupakan hal yang

¹⁰ Pikiran Rakyat, "UKT Bukan Batal Naik tapi Ditunda hingga Tahun Depan, Begini Penjelasan Jokowi". 2024 <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-018139403/ukt-bukan-batal-naik-tapi-ditunda-hingga-tahun-depan-begini-penjelasan-jokowi?page=all> Diakses pada 9 Juni 2024

penting termasuk dalam bentuk pemberian tanggapan dan masukan (Suharto, 2008).

Masyarakat secara terbuka menyuarakan ketidakpuasan, merasa terbebani dan menolak kebijakan dengan melakukan protes dan demonstrasi merupakan indikasi kesenjangan kebijakan, adanya perbedaan antara tujuan dan hasil kebijakan dengan harapan, kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kebijakan publik sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, menciptakan kesenjangan yang perlu diatasi melalui evaluasi dan penyesuaian kebijakan. (Thomas, 1981)

Meskipun resistensi masyarakat terhadap kebijakan Tapera sudah terlihat, analisis sentimen diperlukan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Tapera. Analisis sentimen membantu mengidentifikasi tanggapan masyarakat dalam jumlah besar dan spesifik pada kebijakan Tapera. Memahami tanggapan dan reaksi masyarakat penting dilakukan agar kebijakan dapat diterima baik oleh masyarakat sehingga mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan indikasi dan temuan identifikasi masalah, dapat disimpulkan bahwa terdapat sentimen masyarakat terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat. Maka, rumusan masalah dari penelitian ini adalah, **“Bagaimana sentimen masyarakat terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)?”**

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka secara khusus penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sentimen masyarakat terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)?
2. Bagaimana hasil sentimen masyarakat menggunakan analisis sentimen otomatis (*machine learning*) dan analisis sentimen manual dalam memahami tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti di atas maka untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menggunakan analisis sentimen.
2. Untuk mengetahui analisis sentimen otomatis (machine learning) dan analisis manual dalam memahami tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mengenai Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 adalah:

1.6.1. Manfaat Akademis

Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta wawasan mengenai Ilmu Administrasi Publik khususnya pada Kebijakan Publik. Selanjutnya sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis sentimen terhadap kebijakan publik. Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai analisis sentimen masyarakat. Meningkatkan pengembangan teori dan metode analisis sentimen masyarakat.

1.6.2. Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak terkait dengan pembahasan penelitian adalah

1. Bagi pembuat kebijakan, sebagai bahan masukan terkait sentimen masyarakat terhadap kebijakan publik.
2. Bagi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan BP Tapera sebagai pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), agar dapat memanfaatkan analisis sentimen dalam mengidentifikasi tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan aspek-aspek yang perlu dibenahi berdasarkan sentimen masyarakat.
3. Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan mendorong keterlibatan dan partisipasinya dalam proses kebijakan guna memecahkan masalah publik yang sesuai dengan harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat.
4. Selanjutnya, menjadi masukan untuk upaya meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di masa mendatang.